

RESPONS PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN GERAKAN *ISLAMIC STATE* DI INDONESIA

THE RESPONSE OF INDONESIAN GOVERNMENT TO DEAL WITH THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC STATE IN INDONESIA

Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti

Alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
E-mail: Novie_lucky@ymail.com and feriana.kushindarti@gmail.com

Abstract

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

Key words: Indonesia, influence, Islamic State, response

Abstrak

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. Beberapa dari mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militan di Indonesia dalam memobilisasi masyarakat untuk bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari uraian di atas, artikel ini akan membahas tentang perkembangan gerakan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarinya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme Indonesia.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

Pendahuluan

Deklarasi “khalifah” yang di nyatakan oleh Abu Bakr al Bagdadi pada bulan Oktober tahun 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal dengan nama Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah kelompok organisasi jihad yang mempunyai tujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (kekhalifahan Islam) di wilayah Irak dan Suriah. Pergerakan kelompok ISIS untuk membentuk Negara Islam yang mengendalikan wilayah Aleppo bagian utara sampai Bagdad bagian selatan termasuk wilayah Raqqa di Suriah dan Mosul di Irak menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional di Timur Tengah.¹ Sejak kemunculannya, pergerakan Negara Islam memiliki ideologi ekstrim. Hal ini dapat memberikan ancaman atau teror kepada masyarakat disertai dengan beberapa pelanggaran seperti aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok dalam membentuk Negara Islam.

Sejak pergerakan ini muncul, semakin banyak masyarakat yang tinggal di Irak dan Suriah berada di bawah kekuasaan dan kontrol Negara Islam. Dalam perkembangannya, ISIS melakukan aliansi ataupun kerjasama dengan beberapa aktor untuk mempertahankan kekuasaannya dan kontrol di wilayah yang telah didominasi. Selain melakukan aliansi untuk memperkuat kekuasaan dan kontrol, ISIS juga mendominasi kota-kota penting di Irak dan Suriah. Melihat perkembangan pergerakan ISIS untuk membentuk Negara Islam, pemerintah melakukan kontrol dan upaya penyelesaian dengan mengirimkan pasukan militernya dan sukarelawan ke beberapa wilayah yang menjadi target pergerakan ISIS.

Berkembangnya pergerakan ISIS dan kekuatan militernya dalam membentuk Negara Islam dapat menyebabkan terjadinya konflik dan tentunya akan mempengaruhi keadaan politik maupun keamanan regional di kawasan Timur Tengah. Konflik yang ditimbulkan oleh gerakan

Negara Islam telah memberikan dampak buruk bagi negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang menjadi korban konflik yang terpaksa harus meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di negara lain. Perkembangan pergerakan ini tidak hanya mengancam stabilitas politik dan keamanan di negara Irak dan Suriah, melainkan juga keadaan negara lain yang terpengaruh oleh pergerakan ISIS dalam pembentukan Negara Islam. Akibatnya kelompok ISIS memproklamirkan diri mereka sebagai kelompok IS (*Islamic State*) sebagai bentuk kesatuan perjuangan menciptakan Negara Islam di dunia internasional.

Dengan melihat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh ISIS, masyarakat internasional mulai memberikan perhatiannya terhadap aksi-aksi yang dilakukan dan upayanya membentuk Negara Islam. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah Amerika Serikat yang mengirimkan pasukan militernya untuk mengantisipasi serangan kelompok IS dan melindungi kepentingan mereka di Irak. Tidak hanya Amerika Serikat yang memberikan respons, Liga Arab dan Uni Eropa juga menyatakan bahwa pemerintah Irak dan pemerintah di kawasan tersebut perlu melakukan kerjasama dalam bidang politik dan kekuatan militer dalam menghadapi serangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Terkait dengan konflik yang terjadi, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon juga menyatakan bahwa masyarakat internasional juga harus memberikan dukungan kepada pemerintah Irak dalam menghadapi aksi yang dilakukan oleh kelompok ISIS untuk membentuk Negara Islam.

Dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan gerakan kelompok ISIS mendapatkan perhatian dari negara maupun aktor dalam hubungan internasional. Beberapa dari mereka ada yang memberikan dukungannya kepada gerakan ISIS dalam membentuk Negara Islam sementara yang lainnya menentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh ISIS. Melihat aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok ISIS dengan membunuh tentara Irak dan Suriah, kaum minoritas, wartawan Barat yang melakukan peliputan dan masyarakat sipil lainnya yang tinggal di daerah konflik juga mendapatkan perhatian dari negara-negara Asia

¹ Diperkirakan antara 6-8 juta akan tetapi sosok sesungguhnya tidak diketahui, terutama dikarenakan banyak penduduk yang berasal melarikan diri. Contoh dapat dilihat pada artikel “Islamic State fill coffers from illicit economy in Syria Iraq,” , <https://www.wsj.com/articles/islamic-state-fills-coffers-from-illicit-economy-in-syria-iraq-1409175458>, diakses pada 27 Desember 2014.

Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia.

Wakil Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean menyatakan kepada parlemen Singapura, jika kelompok ISIS memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara, hal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan regional dan mengancam kestabilan kawasan Asia Tenggara.² Tidak hanya mengancam keamanan kawasan, pengaruh ini juga akan memberikan dampak keamanan nasional di Singapura. Oleh karena itu, pemerintah Singapura memutuskan untuk mengirimkan pasukan militernya untuk membantu melawan gerakan ISIS membentuk Negara Islam. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak mengutuk gerakan yang dilakukan oleh ISIS merupakan tindakan kejahatan.

Malaysia yang memiliki latar belakang masyarakat multi-etnis tidak lepas dari keberadaan kelompok ekstrimis yang ingin memberikan dukungan dan bergabung secara langsung dengan gerakan yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Untuk menghentikan perkembangan dukungan tersebut, pemerintah Malaysia menangkap sejumlah orang yang melakukan perjalanan untuk bergabung dengan gerakan “jihad” bersama dengan ISIS. Pemerintah Malaysia juga melakukan interogasi ke sejumlah orang yang dicurigai dan mereka yang mengungkapkan dukungannya secara terbuka terhadap gerakan ISIS. Sedangkan di Filipina, dampak pergerakan ISIS dalam membentuk Negara Islam tumbuh dengan pesat. Ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa aksi perekrutan yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dilakukan di Universitas maupun sekolah-sekolah di Mindanao. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 200 warga Filipina meninggalkan negara tersebut dan bergabung dengan kelompok ISIS untuk menduduki wilayah Irak dan Suriah.³

Sementara negara seperti Indonesia yang memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait dengan gerakan kelompok ekstrimis dan

² Ahmed S. Hasyim, “The Impact of the Islamic State in Asia”, Policy Report, S. Rajaratnam School of International Studies, 15 Februari 2015.

³ Ahmed S. Hasyim, “The Impact of the Islamic...”, hlm.12.

terorisme merasa khawatir akan berkembangnya pengaruh dan menguatnya gerakan IS di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam menangani aksi kekerasan dan ancaman yang diakibatkan oleh gerakan ekstrimis di beberapa wilayah Indonesia. Gerakan ekstrimis di Indonesia sudah dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1949, seorang aktivis politik Islam, S.M. Kartosuwirjo telah memproklamkan Negara Islam yang independen di Jawa Barat. Kondisi inilah yang mendorong munculnya gerakan Darul Islam yang melakukan kontrol di beberapa provinsi Indonesia. Gerakan Darul Islam kemudian mendorong dan menginspirasi munculnya gerakan Islam lainnya seperti Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1970-an dan Jemaah Islamiyah pada tahun 1990-an.

Gerakan Islam di Indonesia tidak hanya sebatas pada NII dan Jemaah Islamiyah, namun juga gerakan Islam lainnya seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Salafi, Front Pembela Islam (FPI) dan lainnya. Gerakan Islam tersebut memberikan pengaruh yang signifikan di Indonesia mengenai Islam dan gerakannya. Beberapa dari kelompok tersebut memiliki jaringan tertutup dan penerapan ideologi kelompok atas nama Islam yang dianggap keras⁴ oleh masyarakat Indonesia secara umum, sehingga menimbulkan beragam gesekan dalam kehidupan sosial seperti aksi perusakan, penyebaran ancaman hingga teror. Beberapa kelompok Islam yang ada di Indonesia yang seringkali ajarannya bersinggungan dengan ideologi negara dapat dikelompokkan sebagai gerakan Islam transnasional. Gerakan Islam transnasional merupakan gerakan yang aktivitasnya melampaui batas-batas teritorial negara.⁵ Beberapa diantaranya, kelompok gerakan Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa mereka mendukung aksi ISIS dalam membentuk

⁴ Keras yang dimaksud adalah penerapan perspektif Islam oleh kelompok yang dianggap masyarakat awam cukup keras karena bertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan maupun ideologi negara Indonesia sehingga memunculkan tindakan separatis kelompok yang bersangkutan.

⁵ Kementerian Agama RI, *Perkembangan paham keagamaan transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 1

Negara Islam, sebagai contoh dukungan yang berasal dari Jemaah Islamiyah, Negara Islam Indonesia dan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Anggota kelompok gerakan ini kemudian direkrut oleh ISIS dan bergabung secara langsung dengan pasukan ISIS di Irak dan Suriah. Sedangkan kelompok lainnya di Indonesia seperti Forum Aktivistis Shariat Islam (FAKSI) dan Forum Pendukung Daulah Islamiyah (FKDI) yang mendukung gerakan Negara Islam oleh ISIS, memobilisasi beberapa aktivis dan pendukung gerakan dengan membuat serangkaian pertemuan di beberapa wilayah seperti di Tangerang, Bekasi, Bima, Sumbawa dan Jakarta.⁶ Kondisi ini kemudian mendorong munculnya kelompok dan forum di Indonesia yang memberikan dukungan kepada gerakan ISIS untuk membentuk Negara Islam serta menyebarkan kontrol dan pengaruhnya.

Dari latar belakang pergerakan gerakan Islam di Indonesia, gerakan untuk membentuk Negara Islam di Irak dan Suriah mendapatkan perhatian dari beberapa organisasi Islam di Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungannya kepada gerakan pembentukan Negara Islam oleh ISIS.⁷ Meningkatnya dukungan dan pengaruh gerakan ISIS untuk membentuk Negara Islam dengan upaya militan lokal memobilisasi masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan aksi yang dilakukan kelompok ISIS di Irak dan Suriah membuat pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan pencegahan. Membesarnya dukungan untuk gerakan ISIS membentuk Negara Islam (selanjutnya disebut gerakan IS) dari Jamaah Islamiyah, Negara Islam Indonesia ataupun kelompok ekstrimis lainnya yang berkembang di Indonesia telah mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengambil tindakan serius dan antisipatif dengan melakukan kerjasama bersama negara-negara lain.

Dari tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, dapat dikatakan bahwa keputusan dan langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah sebagai implementasi kebijakan

pemerintah Indonesia. Untuk menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan gerakan IS, peneliti menggunakan pendekatan proses pembuatan keputusan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia atau pembuat keputusan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia. Keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dan pembuat keputusan adalah untuk mencari solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Indonesia.⁸

Sebelum mengambil keputusan, aktor pengambil keputusan perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan mengenai masalah yang sedang dihadapi Indonesia. Faktor-faktor di sekitar para pengambil keputusan penting untuk dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi keputusan akhir yang akan diambil. Menurut Felix A. Nigro, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan seperti adanya faktor tekanan dari luar yang berarti bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kembali faktor-faktor alternatif untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran ketika ada tekanan dari luar yang mempengaruhi. Faktor dari luar yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan dapat berasal dari individu, kelompok atau organisasi sosial politik baik itu domestik maupun internasional. Selain itu, ada juga kecenderungan dari pengambil keputusan untuk mengikuti atau melanjutkan kebijakan pemimpin sebelumnya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mencegah meluas dan berkembangnya pengaruh gerakan IS.

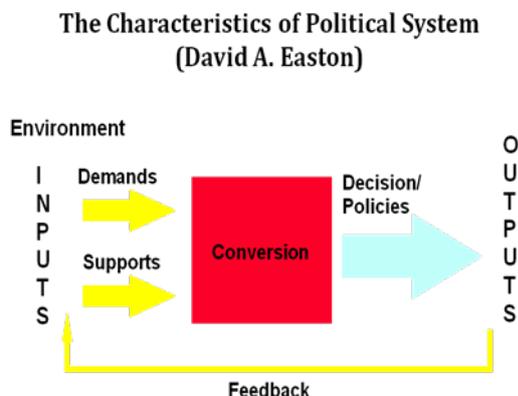
Terkait dengan proses pengambilan keputusan suatu negara, David A. Easton dalam *Characteristics of Political System* melihat bahwa sistem politik di suatu negara sebagai langkah dari proses pengambilan keputusan memiliki batas dan dapat berubah sesuai situasi yang sedang terjadi. Dalam model sistem politik, ada fungsi input (*demands* dan *supports*), konversi

⁶ Rohan Gunaratma, "The Rise of the Islamic State: Terrorism's New Face In Asia", *Panorama* 01/2015: 9-20, hlm.12.

⁷ Ahmed S.Hasyim, "The Impact of the Islamic...", hlm.11.

⁸ Iman Murtono Soenhadji, *Teori Pengambilan Keputusan*, Lihat: <http://imansoenhadji.files.wordpress.com/2010/09/handout-tpk-iman.pdf>, diakses pada Maret 2017.

dan *output* sebagai produk dalam sistem politik. Gambar dibawah ini menunjukkan kehidupan politik yang digambarkan oleh David A. Easton.⁹



Gambar 1. Model Sistem Politik David A.Easton

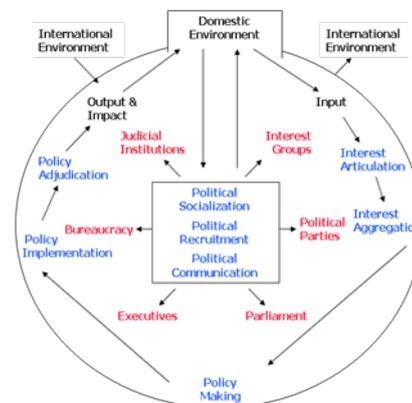
Gambar diatas menunjukkan bahwa selama proses pengambilan keputusan, pemerintah suatu negara perlu memperhatikan fungsi *inputs* dengan mempertimbangkan faktor lingkungan baik itu domestik maupun internasional, *demands* dan *supports* mengenai masalah yang dihadapi agar kebijakan akhir yang diambil oleh pengambil keputusan sesuai dengan cara yang akan ditempuh pemerintah Indonesia untuk mengatasi gerakan IS dalam mewujudkan Negara Islam.

Sedangkan Gabriel Almond menggambarkan bahwa sistem politik suatu negara terdiri dari kelompok lembaga dan organisasi yang mempunyai peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk masyarakat, kelompok maupun tujuan yang ingin dicapai pemerintah sebagai bagian dari pengambil keputusan dalam sistem politik. Dalam pendekatannya (struktural dan fungsional), sistem politik disusun dari berbagai komponen termasuk para pemangku kepentingan, partai politik, dan lembaga-lembaga pemerintah. Masing-masing komponen dalam sistem politik tersebut mempunyai pengaruh, peran dan tujuan masing masing dalam proses pengambilan keputusan. Gambar dibawah ini menunjukkan tentang bagaimana aktor dalam proses pengambil

⁹ Nur Azizah, "Indonesian Political System", presentasi disampaikan dalam kuliah *Comparative Politics*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 22 Oktober 2010.

keputusan suatu negara dapat mempengaruhi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan.¹⁰

The structure & functions of Political System (Gabriel Almond)



Gambar 2. Proses pengambilan keputusan suatu negara

Dari pembahasan diatas, tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan gerakan IS untuk mewujudkan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal ini berdampak pada kondisi dan stabilitas keamanan di Indonesia. Ketika muncul permasalahan yang mempengaruhi stabilitas dan kondisi keamanan di Indonesia, pemerintah perlu melakukan intervensi dan memutuskan kebijakan apa yang harus diambil pemerintah dalam menangani gerakan IS di Indonesia. Para pengambil keputusan perlu memutuskan kebijakan mereka dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia menjaga keamanan dan melindungi warga negaranya. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas tentang respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi perkembangan dan pengaruh gerakan IS untuk membentuk Negara Islam yang terjadi di Indonesia.

Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi gerakan IS di Indonesia dapat dilihat dalam implementasi kebijakan yang dijalankan pemerintah. Seiring berkembangnya dan meningkatnya aksi yang dilakukan oleh gerakan IS, hal ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia seperti meningkatnya gerakan ekstrimis dan radikal yang menyebarkan teror dalam masyarakat. Tidak hanya itu,

¹⁰ Nur Azizah, "Indonesian Political System.", hlm. 2

perkembangan gerakan IS juga menimbulkan aksi solidaritas dari beberapa orang tertentu atau organisasi Islam tertentu yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah orang yang bergabung dengan gerakan IS di negara lain terutama di Irak dan Suriah. Kondisi inilah yang akhirnya akan mempengaruhi stabilitas keamanan dan kedaulatan Indonesia jika tidak segera diatasi.

Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok IS dalam mewujudkan Negara Islam telah melanggar hak asasi manusia dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki fungsi untuk melindungi warga negaranya dari tindakan apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengancam keselamatan seseorang. Untuk melindungi warga negaranya, pemerintah Indonesia mendirikan BNPT, Densus 88 dan organisasi atau lembaga lain yang melakukan kerjasama untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dengan pembentukan lembaga pemerintah maupun instansi terkait yang melakukan kerjasama dalam rangka pencegahan dan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh kelompok IS dan pendukungnya, diharapkan hal ini dapat meminimalkan dan menekan gerakan IS dan pendukungnya dalam mencapai tujuannya di Indonesia.

Perkembangan Gerakan Negara Islam di Indonesia

Sejak menurunnya kekuatan dan pengaruh Al-Qaeda di dunia, pengaruh Al-Qaeda telah digantikan oleh entitas subversif yang lebih kuat yaitu adanya kemunculan gerakan kelompok IS dalam mewujudkan Negara Islam. Keberadaan IS yang memberikan pengaruh luas telah mengancam keselamatan warga yang berada dan tinggal di daerah konflik maupun negara lain. Bukan hanya ancaman terhadap pelanggaran kemanusiaan, ideologi yang diciptakan atau diperkenalkan oleh IS untuk menciptakan kekhalifahan atau negara Islam secara global juga dapat mengganggu kedaulatan suatu negara. Kondisi inilah yang mendorong negara lain dan masyarakat internasional memberikan perhatiannya terhadap aksi yang dilakukan oleh kelompok IS. Dampak dari gerakan tersebut

juga dapat dirasakan di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah Indonesia.

Di Indonesia, perekrutan yang dilakukan oleh kelompok IS berasal dari berbagai usia, latar belakang pendidikan, sosial dan ekonomi serta para profesional. Kurang lebih 1.000-2.000 orang yang berjanji untuk setia dan memberikan dukungan kepada gerakan IS membentuk Negara Islam.¹¹ Ancaman yang diberikan oleh gerakan kelompok IS telah menyebar dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan telah mempengaruhi warga Muslim maupun kelompok lainnya. Tidak hanya itu, kelompok IS dan pendukungnya juga melakukan serangan-serangan di dalam negeri, terutama serangan terhadap pemerintah dan kelompok agama minoritas dan orang asing yang dianggap akan mempengaruhi ataupun menghambat gerakan mereka di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang memotivasi seorang individu untuk bergabung dengan jaringan terorisme. Motivasi dapat muncul dari beberapa faktor seperti faktor domestik suatu negara. Kondisi suatu negara seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial ataupun kekecewaan masyarakat akan kebijakan yang diambil pemerintah dapat mendorong seseorang untuk bergabung dalam kelompok tertentu untuk melakukan protes dan mengubah kondisi sesuai yang diinginkan. Tidak hanya faktor domestik suatu negara yang dapat memotivasi seseorang untuk bergabung dalam kelompok tertentu, faktor internasional juga dapat menimbulkan sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, arogansi politik internasional dan imperialisme modern yang dilakukan oleh negara-negara berkuasa. Terakhir, faktor budaya seseorang dalam pemahaman agama yang sempit dan pemahaman atas kitab suci yang dangkal seringkali membuat seseorang salah bertindak dan pada akhirnya bergabung dalam aksi kelompok tertentu yang mereka percayai dapat mengubah kondisi seperti yang diinginkan.

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, memberikan arti penting dalam konsep

¹¹ Febrian, "ISIS Mulai Tanam Pengaruh di Indonesia", 2 Agustus 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/02/15425531/ISIS.Mulai.Tanam.Pengaruh.di.Indonesia.Pemerintah.Diminta.Batasi.Ruang.Gerak>, diakses pada 9 Maret 2017.

kekhalfahan global yang diperkenalkan oleh gerakan IS. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim, potensi masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan latar belakang, tradisi dan pemahaman agama dapat menguntungkan kelompok IS dan pendukungnya lebih mudah dalam memberikan pengaruhnya. Sejak munculnya video yang di unggah pada laman *YouTube* yang memperlihatkan orang Indonesia yang bergabung untuk mendukung dan memberikan ancaman kepada masyarakat, kelompok IS kemudian menjadi perbincangan dikalangan masyarakat maupun pemerintah.

Munculnya para pendukung gerakan yang dilakukan oleh kelompok IS di Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran atas hubungan antara kelompok-kelompok jihad yang berkembang di Indonesia dengan kelompok jihadis global. Selain itu, ada beberapa kelompok yang menyatakan dukungannya kepada kelompok IS seperti di Malang, Solo, Bima dan beberapa wilayah lain di Indonesia yang berpotensi muncul kelompok Islam radikal. Tentunya hal tersebut akan mendorong adanya rasa tidak aman dalam masyarakat. Untuk itulah masyarakat beserta pemerintah harus melakukan kerjasama dalam menghadapi perkembangan dan pengaruh yang akan ditimbulkan dari gerakan kelompok IS dan pendukungnya.

Deklarasi yang dinyatakan oleh kelompok ekstrimis pendukung kelompok IS menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Muslim di Indonesia. Pihak-pihak yang sepakat atas klaim pembentukan Negara Islam sebagai langkah awal untuk mewujudkan kekhalfahan negara-negara Islam secara global memberikan dukungan baik itu dengan bergabung dengan gerakan kelompok IS secara langsung maupun membentuk organisasi atau forum yang menyatakan dukungannya terhadap gerakan pembentukan Negara Islam. Dukungan-dukungan yang diberikan dapat berupa pernyataan maupun video yang disebarluaskan melalui media-media propagandanya di dunia maya maupun selebaran. Sementara pihak yang menyangkal klaim yang dilakukan oleh kelompok IS dalam menciptakan Negara Islam secara global menganggap bahwa aksi-aksi yang dilakukan adalah merupakan ancaman bagi negara maupun masyarakat dan dapat

mengganggu kestabilan keamanan negara. Selain itu, pembentukan Negara Islam juga bertentangan dengan ideologi Pancasila sehingga hal tersebut dapat merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut DR KH Ma'ruf Amin, perwakilan MUI Jakarta, model khalifah hanya terjadi pada era Al-khulafa Ar-rasyidin, apalagi model yang diimplementasikan di suatu negara berbeda-beda.¹²

Sejak deklarasi kekhalfahan oleh pemimpin gerakan Negara Islam Indonesia, Abu Bakar al Bagdadi pada tahun 2014, setidaknya ada 18 kelompok ekstrimis yang mendukung Negara Islam di Indonesia.¹³ Tabel dibawah ini menunjukkan kelompok-kelompok agama di Indonesia yang memberikan dukungan, menentang atau netral dalam pembentukan Negara Islam.¹⁴

Tabel 1. Kelompok Agama di Indonesia

Oppose Islamic State	Grey Area	Support Islamic State
Nahdlatul Ulama (Moderate Traditionalist organization)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Islamic party	Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) led by Abu Bakarba'asyir
Muhammadiyah (Moderate Modernist Organization)	Islamic Defenders front (IFI), anti-vice militia	Jamaah Tauhid Wal Jihad led by Aman Abdurrahman
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	Islamic people's forum, an umbrella organization for various radical groups	Forum Activist Syariat Islam (FAKSI) led by M.Fachry, editor in chief of the extremist website <i>al-mustaqbal</i>
Council of Indonesian Ulama	Ja'far Umar Thalib (ex-commander of the laskar jihad), salafi-brand	Mujahidin Indonesia Timur (MIT) led by Santoso

Sumber: Muh.Taufiqurrahman "The Road ISIS: How Indonesia Jihadists travel to Syria and Iraq", *Counter Terrorist Trends and Analysis* (CTTA) Vol.7 Issue 4 (2015): 17-25

Kelompok yang memberikan dukungan kepada pembentukan Negara Islam kebanyakan berasal dari kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Keberadaan Jamaah Islamiyah dapat ditelusuri dari sejarah Darul Islam, sebuah gerakan pemberontakan di Jawa Barat yang memberlakukan Hukum Islam setelah masa penjajahan Belanda. Para pendiri Jamaah Islamiyah, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, Jamaah Islamiyah secara resmi didirikan pada tahun 1993 di Malaysia dan

¹² Ma'ruf Amin. "ISIS: Gerakan Kekhalifan Islam Global dan Tantangan bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil Alamin", disampaikan pada *Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamini*", Jakarta, 9 August 2014.

¹³ Muh.Taufiqurrahman, "The Road ISIS: How Indonesia Jihadists travel to Syria and Iraq", *Counter Terrorist Trends and Analysis* (CTTA) vol.7, Issue 4 (2015), hlm.19.

¹⁴ IPAC, "The Evolution of ISIS in Indonesia", *IPAC report*, No. 13 (2014).

kembali ke Indonesia setelah berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi, beberapa anggota Jamaah Islamiyah yang tidak senang, yang akhirnya membentuk kelompok Majelis Mujahidin Indonesia pada tahun 2000. Selanjutnya, Abu Bakar Ba'asyir memutuskan untuk mendirikan organisasi baru pada tahun 2008 yang dinamakan sebagai Jamaah Ansharut Tauhid yang mempunyai tujuan untuk menerapkan kekhalifahan di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa kelompok yang muncul di Indonesia dengan strategi mereka sendiri dalam menjalankan gerakannya.

Singkatnya, kelompok gerakan Islam di Indonesia semakin berkembang di era reformasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan maraknya pendirian partai Islam yang kemudian memunculkan kekhawatiran sebagai bentuk indikasi dari kemunculan gerakan fundamentalisme Islam yang pandangan dan aktivitasnya bersumber dari gerakan Islam di Timur Tengah yang tindakannya cenderung bersifat radikal.¹⁵ Situasi ini juga didukung oleh fenomena maraknya ormas-ormas Islam seiring dengan kebebasan yang diberikan di era reformasi sehingga mengakibatkan kurangnya kontrol pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama, kebebasan aktivis Muslim dan kebebasan berbicara bagi kelompok-kelompok radikal. Perkembangan fenomena ini tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang mudah oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendukung pembentukan Negara Islam menjadi faktor ancaman bagi kedaulatan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Saat ini, berkaitan dengan kemunculan pendukung gerakan untuk membentuk Negara Islam di Indonesia, upaya propaganda oleh kelompok-kelompok tersebut tidak hanya mengandalkan gerakan kelompok radikal itu sendiri, akan tetapi mereka juga memanfaatkan media sosial dan mengajak masyarakat Indonesia untuk bergabung melakukan jihad di Irak dan Suriah.

Peningkatan jumlah pendukung Negara Islam secara online dapat dilihat melalui *websites*, *facebook* dan *twitter*. Peningkatan

¹⁵ Azyumardi Azra, "Fundamentalisme Partai Islam", dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (eds), *Mengapa partai Islam kalah? Perjalanan politik Islam dari pra-pemilu '99 sampai pemilihan presiden*, (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 37

jumlah pendukung Negara Islam ini dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat Indonesia yang pindah ataupun melakukan perjalanan untuk bergabung dengan pasukan IS di Irak atau Suriah dengan memberikan bantuan untuk membentuk Negara Islam. Ancaman yang muncul dan menyebar di Indonesia tentunya menjadikan pemerintah dan masyarakat Indonesia menjadi terganggu. Pemerintah Indonesia perlu melakukan investigasi secara mendalam dan membahas lebih lanjut masalah yang terjadi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, penyebab berkembangnya pengaruh dan kekuatan kelompok IS dalam mendirikan Negara Islam di Indonesia perlu dikendalikan dan diatasi dengan segera.

Dampak yang disebabkan oleh Pengaruh Gerakan Negara Islam/ IS di Indonesia

Menurut beberapa diskusi yang ditulis sebelumnya, ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan gerakan IS di Indonesia. Faktor yang mendukung berkembangnya gerakan IS di Indonesia adalah adanya paham anti Barat oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat yang anti Barat ini menganggap bahwa negara-negara Barat menciptakan tirani terhadap negara Islam dan Muslim. Kebijakan *war on terrorism* yang diperkenalkan oleh negara Barat mendorong kemunculan kelompok-kelompok radikal dan pendukungnya yang melakukan serangan balik (*counter-attack*) terhadap negara Barat terutama Amerika Serikat yang mengenalkan *war on terrorism* secara global. Selain itu, faktor distorsi agama juga dapat mendorong penyebaran ideologi Negara Islam. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis yang terbatas juga dapat mendorong terjadinya kesalahpahaman.¹⁶

"Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang muncul tidaklah terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti"

¹⁶ Ma'ruf Amin, "ISIS: Gerakan Kekhalifan Islam Global dan Tantangan bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil Alamin", disampaikan pada *Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin*", Jakarta, 9 August 2014.

Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan gerakan IS di Indonesia didukung dengan paham demokrasi yang dianut negara Indonesia yang memberikan kebebasan berekspresi dan berorganisasi kepada masyarakatnya. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok radikal Islam untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Negara Islam. Distorsi pemahaman agama yang ada seolah-olah mengizinkan seseorang untuk melakukan tindakan apapun baik itu dengan kekerasan dan pengeboman untuk mewujudkan kekhalifahan Negara Islam. Sebagai bukti atas aksi mereka di Indonesia adalah dengan adanya pengeboman dan aksi-aksi anarkis dengan menghancurkan fasilitas yang ada oleh beberapa kelompok yang mendukung pembentukan Negara Islam. Dukungan dari beberapa masyarakat Indonesia juga dapat dilihat dari adanya beberapa orang yang melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah untuk melakukan jihad. Seperti yang telah dilaporkan, adanya keikutsertaan beberapa aparat negara yang merekrut oleh paham IS beserta keluarganya yang pergi untuk bergabung dengan kelompok IS melakukan jihad.¹⁷

Selain itu, meningkatnya jumlah organisasi Islam yang memberikan dukungan kepada gerakan kelompok IS dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan untuk menguasai suatu wilayah telah mendorong dan memobilisasi gerakan radikal di Indonesia. Banyak dari mereka yang melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan gerakan para jihadis secara langsung. Bahkan, menurut perkiraan resmi yang dikeluarkan tentang pendukung gerakan kelompok IS, jumlah orang Indonesia yang bergabung dengan IS melonjak dari 56 di pertengahan tahun menjadi 110 di akhir tahun 2014.¹⁸

Kondisi ini mengkhawatirkan masyarakat Indonesia karena pendukung yang turun secara langsung dan bergabung dengan pasukan IS akan mendapatkan kemampuan dan jiwa kepemimpinan yang baik untuk memimpin

¹⁷ Lembaga Sandi Negara, "Waspada Paham Radikalisme di Tubuh Aparat", diakses dari <https://www.lemсанeg.go.id/index.php/waspada-paham-radikalisme-di-tubuh-aparat/>, pada 23 Maret 2015

¹⁸ Muh. Taufiqurrahman, "The Road ISIS: How Indonesia...", hlm.11

gerakan radikal ataupun ekstrimis di Indonesia. Selain itu, mereka juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan selama bergabung dengan IS, seperti bagaimana kelompok ini mendapatkan dana untuk mengembangkan kelompok menjadi lebih besar.

Kondisi tersebut di atas menjadi salah satu indikator keberhasilan kelompok IS dan pendukungnya dalam mempengaruhi masyarakat Indonesia. Pengaruh perkembangan tidak hanya dirasakan di Madura saja, akan tetapi konflik-konflik di daerah lain seperti di Poso, Bima dan Nusa Tenggara Timur menjadi pusat kegiatan terorisme di Indonesia pada tahun 2014. Kelompok Mujahidin dari Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santosa diduga menjadi pelaku di balik serangan yang menargetkan kepolisian Indonesia. Sedangkan anggota kelompok Mujahidin Indonesia bagian Barat juga melakukan aksi perampokan bank di Purworejo, Jawa Tengah.¹⁹

Di Indonesia, kelompok seperti JTWJ, JAT dan MI adalah pendukung dan pengikut yang aktif. Mereka memiliki anggota terbesar yang ingin melakukan perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi kelompok untuk melakukan perjalanan ke Irak dan Suriah dan menyebarkan ideologi kekhalifahan di Indonesia. Faktanya, ancaman yang diberikan oleh perkembangan dan pengaruh gerakan IS di Indonesia dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung melalui radikalisasi yang dilakukan secara online. Kelompok IS dan pendukungnya secara bertahap melakukan promosi dan kampanye melalui media online untuk menyebarkan ideologi dan pesan-pesan ekstrimisnya. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada tahun 2015 oleh *International Centre for Political Violence and Terrorism Research* (ICPVTR) di Singapura, setidaknya terdaftar 300 situs ekstrimis, forum dan akun sosial media yang berada di Asia Tenggara dan kebanyakan dari mereka berisi bahan-bahan yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia maupun Melayu, Malaysia.²⁰ Meskipun

¹⁹ Arianti, "Indonesia Counter Terrorist Trends and Analysis, Vol.7 Issue 1 (2015) : 4-19, hlm. 9

²⁰ ICPVTR, Unpublished Report, (Singapore: International

terdapat beberapa kelompok Islam yang pro akan terbentuknya Negara Islam baik itu secara online maupun kegiatan kelompok seperti dalam dakwah atau kajian-kajian keagamaannya, namun ada juga kelompok yang menyatakan tidak setuju dengan gerakan yang dilakukan oleh IS untuk mewujudkan kekhalifahan global.

Dampak dari gerakan IS yang menyebar diseluruh dunia, ternyata akan berpengaruh dalam sektor lainnya seperti sektor ekonomi dan psikologi sosial masyarakat suatu negara. Kepercayaan masyarakat internasional ataupun aktor dalam hubungan internasional lainnya yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia menurun dan hal ini nantinya akan mempengaruhi jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Selain itu, aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok IS dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat terutama mereka yang tinggal disekitar wilayah operasi kelompok IS. Melihat dampak yang ditimbulkan, untuk itu peran pemerintah sangat penting dalam merespon dan mengatasi masalah yang yang dihadapi Indonesia terkait pergerakan dan perkembangan IS untuk mewujudkan kekhalifahan di Indonesia.

Respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi Gerakan *Islamic State*

Perkembangan kelompok IS baik dari sisi kemunculan, aksi dan penyebaran ideologi tidak hanya menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, namun juga lingkup Internasional. Pengaruh IS yang mengancam masyarakat bahkan kedaulatan negara sangat dirasakan khususnya di wilayah Asia Tenggara sehingga respons dari pemerintah selaku pelaksana negara perlu responsif, reaktif dan preventif.

Dalam lingkup nasional ditanggapi oleh pemerintah dalam berbagai hal, salah satunya terlihat dari pernyataan maupun kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan berbagai intervensi dalam menghadapi perkembangan pergerakan dan penyebaran pengaruh IS pada masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan penyebaran ancaman IS di Indonesia secara tidak langsung berdampak terhadap kedaulatan walaupun

penyebaran ancaman tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap masyarakat muslim Indonesia.

Keberadaan dan penyebaran IS baik dari sisi ideologi maupun tindakan vandalismenya bahkan upaya subversif memunculkan ancaman tersendiri bagi Indonesia. Sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas, keamanan dan keselamatan penduduk dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk melindungi negara dari dampak buruk yang disebabkan adanya kemunculan dan penyebaran pengaruh *Islamic States* (IS) di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan merupakan produk dari proses seleksi berbagai alternatif pemecahan masalah yang terjadi.²¹ Dalam proses pembuatan kebijakan, aktor negara perlu mempertimbangkan situasi yang dapat berdampak pada kebijakan tersebut.

Untuk menguatkan kebijakan penanganan terorisme, pemerintah Indonesia menetapkan peraturan presiden (perpres) No 46 tahun 2010 tentang pembentukan badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) yang kemudian diubah menjadi Perpres Nomor 12 tahun 2012.²² Dalam peraturan presiden terbaru disebutkan bahwa dalam kebijakan nasional, BNPT dipertimbangkan sebagai pemimpin sektor yang bertanggungjawab untuk menyusun kebijakan, strategi, koordinasi dan perencanaan program-program pencegahan, manajemen terorisme serta deradikalisasi. Dalam mengatasi permasalahan terorisme di Indonesia, pemerintah tidak hanya menggunakan kekuatan atau militerisme, namun juga dengan cara non-militerisme sebagai bentuk pencegahan. Untuk mencegah penyebaran pergerakan terorisme, BNPT menggunakan strategi seperti kontra radikalisme dengan memberikan dan menguatkan nilai-nilai moral kebangsaan dan nir kekerasan. Pemberian dan penguatan nilai-nilai tersebut salah satunya diimplementasikan

²¹ Iman Murtono Soenhadji, "Teori Pengambilan Keputusan", <http://imansoenhadji.files.wordpress.com/2010/09/handout-tpk-iman.pdf>, diakses pada 11 September 2010.

²² BNPT, "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme", <http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terrorisme.pdf>, diakses pada 18 Juli 2016.

melalui pendidikan formal dan informal tentang pengetahuan akan radikalisme yang masih terbatas di masyarakat Indonesia.

Upaya pemerintah melalui BNPT dalam bidang pendidikan baik formal maupun informal adalah hal yang penting dalam mengantisipasi pergerakan IS dan perkembangan radikalisme pada masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai latar belakang sehingga pemahaman akan agama terutama Islam akan berbeda-beda. Hal itulah yang kemudian dapat membuat adanya tindakan radikal dan kelompok ekstrimis memperluas aksi mereka dalam mempengaruhi masyarakat. Rendahnya pemahaman pada masyarakat dapat membentuk perasaan solidaritas berdasarkan agama seperti yang dipropagandakan oleh kelompok IS untuk menciptakan sebuah negara Islam. Selain memberikan pemahaman melalui pendidikan sebagai upaya untuk meminimalisir perkembangan pergerakan kelompok IS di Indonesia, pemerintah juga memaksimalkan dengan para *stakeholder* berupa kerjasama dengan pemimpin kelompok masyarakat seperti pemimpin agama, tokoh pendidikan, pemimpin adat, generasi muda, dan lain-lainnya yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat sekitarnya dalam memberikan pemahaman nilai-nilai nasionalisme.

Strategi lain yang digunakan oleh BNPT yaitu upaya deradikalisasi. Strategi tersebut ditujukan untuk kelompok simpatisan, militan dan pendukung yang sudah atau belum ditangkap. Strategi tersebut berfungsi untuk menghentikan upaya mereka dalam penggunaan kekerasan dan teror dalam setiap aksi mereka untuk mencapai tujuan. Berkembangnya aksi tersebut sejak dirilisnya video IS pada akhir 2013 dan awal 2014 yang mengajak masyarakat muslim Indonesia untuk bergabung. Sayangnya, penyebaran video tersebut tidak mendapat tanggapan serius dari pihak pemerintah. Akan tetapi, ketika serangkaian pengucapan sumpah sejumlah masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan IS menyebar luas di media massa menyebabkan tidak hanya pemerintahan Presiden Yudhoyono yang mengeluarkan “kecaman” keberadaan kelompok IS namun juga organisasi muslim seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul

agama (NU) dan Muhammadiyah memberikan peringatan terhadap pandangan IS dan larangan untuk turut bergabung karena ketidaksesuaian dengan ajaran Islam maupun agama manapun.²³

Almarhum Hasyim Muzadi, salah seorang pemimpin Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa IS merupakan sebuah kelompok transnasional yang bertujuan untuk membangun negara dan kelompok ekstrimis yang tidak menghormati kedaulatan negara. Tindakan IS tidak mempertimbangkan sebagai bangsa dalam mengambil sebuah tindakan. Mereka sebatas mencoba untuk meningkatkan kekuasaannya dalam mencapai tujuan pada wilayah-wilayah yang berbeda dengan ancaman dan menciptakan kondisi yang kacau.

Selanjutnya sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga meminta kader dan anggota mereka untuk membentengi diri dan keluarga dari pengaruh dan tindakan kelompok IS. Sedangkan, Dr. Ahmad Syafii Maarif dari Muhammadiyah meminta pemerintah untuk peduli terhadap kemunculan kelompok IS di Indonesia sehingga pemerintah harus segera memberantas kelompok tersebut.

Selain itu, Kementerian Agama Indonesia dalam pernyataannya menyebutkan bahwa ideologi IS yang disebarluaskan, kontradiktif dengan ideologi Pancasila. Pernyataan kelompok IS di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sebuah *thogut* atau berhala yang harus diperangi, sudah melampaui batas ketidakwajaran. Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah membuat sebuah forum dialog untuk membentuk satu opini tentang bagaimana sikap atas isu kelompok IS khususnya di Indonesia yang sudah menyebar luas.²⁴

Salah satu respons pemerintah maupun masyarakat atas permasalahan utama IS yaitu rendahnya pemahaman ideologi atau motivasi mereka yang turut serta bergabung. Sumber-sumber informasi, analisis mengenai IS yang

²³ USAID, Indonesian and Malaysian Support for the Islamic State. (South Arlington: Management Systems International corporate office), hlm.23.

²⁴ Fuad Nasar. “Gerakan Isis, Ancaman Ideologi dan Keagamaan NKRI” dalam *Sarasehan Sehari* yang diadakan Kemenag 5 April 2014.

dapat dipercaya sulit ditemukan baik itu dalam sumber-sumber pemerintah maupun publik. Densus memiliki database dan informasi detail operasi kelompok teroris namun seringkali diabaikan dan tidak mendapat perhatian pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebaliknya Badan Intelijen Indonesia (BIN) memiliki sedikit laporan pada analisis terorisme dan aksi militannya.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai badan utama yang diberikan mandat untuk mengkoordinasi penanggulangan terorisme hingga saat ini dirasakan masih minim kapasitas dan staf ahli dalam bidang tersebut. Hanya segelintir akademisi dan peneliti LSM yang lebih memiliki keahlian yang sangat baik. Salah satu dari minimnya organisasi dengan *track record* yang baik berdasarkan komentar publik menurut Sidney Jones²⁵ adalah *Institute For Policy Analysis Of Conflict* (IPAC). Sedangkan media yang secara konsisten melaporkan tentang terorisme dengan baik yaitu Tempo group.

Besarnya perkembangan pengaruh IS di Indonesia menempatkan BNPT sebagai sektor yang memimpin penanganan terorisme untuk menyusun kebijakan, strategi dan program-program pencegahan. Tindakan yang diambil BNPT merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap perkembangan IS karena permasalahan ini telah menjadi permasalahan nasional. Meskipun pemerintah Indonesia telah siap mengembangkan BNPT sebagai pemimpin sektor dalam pemecahan masalah IS dan radikalisme, eksistensi BNPT masih cukup lemah baik dari segi hukum maupun sumberdaya yang masih banyak terbatas di pemerintahan pusat. Di sisi lain, akses BNPT atas teknologi informasi juga menjadi faktor lambatnya deteksi atas fenomena *self-radicalization*.

Respons dari pemerintah Indonesia terhadap perkembangan IS tidak hanya sebatas pada tindakan BNPT dan polisi, tapi juga dilakukan oleh berbagai kementerian yang berkaitan dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Semua instansi bertindak untuk pencegahan bahkan penindakan atas pengaruh IS yang semakin

²⁵ Seorang pakar dan peneliti terorisme di Asia Tenggara dan penasihat senior dari International Crisis Group (ICG) yang berkantor di Indonesia

meluas tidak hanya pada masyarakat umum namun juga pegawai berbagai instansi. Salah satu respon berupa aksi yaitu upaya memblokir 19 laman di internet yang diduga memobilisasi dukungan kepada IS pada Maret 2015 oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Bahkan Kemenkoninfo juga secara tiba-tiba melakukan tindakan yang sama terhadap media dari beberapa organisasi Islam dan LSM. Sayangnya tindakan tersebut terkesan tidak efektif karena tidak menutup kemungkinan untuk membuka alamat laman baru dan fatalnya menunjukkan pengekangan terhadap kebebasan pers atas kelompok-kelompok tertentu yang belum tentu pendukung IS. Akibatnya, BNPT terpaksa mencabut larangan tersebut beberapa hari kemudian dan menyatakan bahwa tindakan Kementerian Informasi dan Komunikasi malah menimbulkan masalah baru.²⁶

Respons pemerintah atas perkembangan IS yang menimbulkan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan, penting untuk diperhatikan. Ancaman tersebut dapat dianalisis dari munculnya beberapa peristiwa pemboman dan bergabungnya sekelompok kecil masyarakat dengan kelompok-kelompok jihadis. Meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok yang mengaku jihadis telah menimbulkan kekacauan dan menyingkirkan nilai-nilai kebangsaan yang pada akhirnya cenderung memunculkan sifat eksklusivisme.

Sebagai negara mayoritas Muslim, eksklusivisme akan membuat golongan agama tersebut resah selama negara dan pemerintah memberi perhatian kepada semua golongan agama.²⁷ Keberadaan agama dalam eksklusivisme menjadi penghalang dalam kesatuan negara yang pluralistis dan rendahnya penghayatan nasionalisme. Sikap eksklusivisme inilah yang kemudian menimbulkan adanya gesekan-gesekan kecil antar masyarakat, dan rangkaian peristiwa bom di beberapa daerah.

²⁶ Haeril Halim dan Hans Nicholas Jong, "Govt unblock radical websites", 1 April 2015, <http://thejakartapost.com/news/2015/04/01/govt-unblocks-radical-websites.html>, diakses pada 5 April 2015.

²⁷ Hendropiyono, A, *Terorisme: fundamentalis, kristen, yahudi, islam*, (Jakarta: Kompas, 2009) hlm. 163.

Kondisi itulah yang menimbulkan respons pemerintah melalui pelibatan TNI. Keterlibatan TNI dalam penanganan perkembangan IS diatur dalam UU nomor 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan. Pada bagian penjelasan pasal 7 (1) dinyatakan salah satu ancaman dan gangguan yaitu aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerjasama dengan teroris dalam negeri atau teroris dalam negeri. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan sejumlah gerakan komunal seperti di Poso cukup besar walaupun wacana TNI dalam pelibatan Rancangan Undang-undang Pemberantasan Terorisme masih pro dan kontra. Pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris dikarenakan adanya analisa ancaman terorisme tidak sebatas pada keamanan dan ketertiban masyarakat tapi juga keamanan negara serta mencoreng nama negara di mata internasional menurut pemerintah.

Dukungan pemerintah atas pelibatan TNI secara politis dapat dilihat pada peringatan hari TNI ke 60 tanggal 5 Oktober mengatakan bahwa TNI penting untuk meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman eksternal. TNI juga harus melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer selain perang. Salah satu tugasnya adalah mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, menanggulangi bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan.²⁸ Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tugas TNI bersinergi dengan BNPT dan kepolisian untuk melakukan deteksi dini sebagai bentuk preventif akan perkembangan IS di Indonesia.

Dampak perkembangan IS juga sangat terasa khususnya di daerah-daerah yang menjadi tempat persembunyian dan *basecamp* mereka. Ditambah dengan beberapa kejadian yang terkait dengan gerakan jaringan terorisme tersebut seperti berita tersebarnya kegiatan deklarasi dukungan terhadap IS tahun 2014 di Malang. Hal inilah yang kemudian menjadi ancaman bagi ketidakstabilan nasional. Kondisi seperti ini kemudian juga direspons cepat oleh pemerintah

tingkat daerah baik yang menjadi wilayah merah (indikasi keberadaan jaringan teroris), maupun yang tidak terindikasi, namun berpotensi, dan sekaligus mendukung keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk memerangi terorisme.

Respons pemerintah daerah yaitu upaya *counter attack* melalui bakesbangpol berupa sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan dan waspada dini tentang paham-paham yang bertentangan dengan NKRI di sejumlah daerah. Sebagai contoh adanya pendekatan yang dilakukan yaitu kunjungan Walikota Malang untuk melakukan silaturahmi, dialog, dan sosialisasi di kecamatan Kedungkandang, Malang.²⁹ Selain itu juga adanya kegiatan diskusi antar umat beragama yang membahas tentang perkembangan pengaruh IS. Respons pemerintah daerah dalam mendukung respons pemerintah pusat terhadap perkembangan IS juga dapat dilihat pada dukungan program pemolisian masyarakat (*community policing*) dalam mencegah pengaruh jaringan terorisme.

Pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan salah satu bentuk deradikalisasi terhadap terduga anggota teroris yang didasarkan pada peraturan Kapolri No 7 tahun 2008.³⁰ Kegiatan polmas di masyarakat antara lain pecalang di Bali, ronda kampung dan lainnya. Tujuan dari pendekatan deradikalisasi berupa polmas ini adalah sebagai bentuk represif yang santun dan menghargai HAM individu yang diduga melakukan kejahatan teroris, sehingga pengaruh IS dapat teratasi dalam jangka waktu yang panjang.

Pada lingkup internasional, pemerintah Indonesia mencoba untuk mengajak masyarakat internasional turut serta memberikan alternatif solusi baik dengan pendekatan fisik (*hard approach*) maupun non fisik (*soft approach*). Pendekatan fisik dapat berguna untuk menguatkan penegakan hukum, sedangkan pendekatan non fisik (*soft approach*) dapat berupa pemberdayaan masyarakat dalam penyebaran nilai-nilai toleransi dan penolakan perspektif radikalisme. Selain itu, negara-negara dan masyarakat internasional juga perlu untuk menguatkan kerjasama dan

²⁸ Puspen TNI, "Keterlibatan TNI dalam memerangi terorisme", 3 November 2006, <http://tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html>, diakses pada Desember 2015.

²⁹ Hasil wawancara dengan warga Kedungkandang, Malang pada Maret 2015

³⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008

pengawasan tentang aliran dana terhadap kelompok teroris.

Walaupun banyaknya tantangan yang dihadapi, pemerintah Indonesia masih memerlukan berbagai alternatif strategi untuk menghadapi dan menghalau pengaruh perkembangan IS khususnya di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Sebagai tindak lanjut di wilayah regional, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan ASEAN melalui penandatanganan konvensi yaitu *Convention on Counter Terrorism in 12th Summit Conference in Cebu, Philippine on 13 January 2007*.³¹

Dari salah satu kerjasama regional dapat dilihat pada rancangan kerja yang memfokuskan pada beberapa kasus, sebagai contoh pertukaran informasi dan data, kontrol perbatasan dan proses migrasi, pendidikan dan pelatihan untuk menghadapi propaganda IS di Asia Tenggara, dan regulasi keuangan dalam pendanaan pemberantasan terorisme. Melalui penandatanganan konvensi dalam penanganan terorisme dengan ASEAN, Indonesia juga dapat mengoptimalkan tindakan-tindakan negara untuk mengatasi perkembangan kelompok IS dan pengaruhnya. Konvensi antarnegara ASEAN juga menjadi bukti pentingnya penanganan dampak gerakan IS dan meminimalisirnya secara bersama-sama.

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk bekerjasama dengan sejumlah negara selain ASEAN, sebagai contoh Kanada. Pada bulan Agustus 2017, RI-Kanada, menandatangani nota kesepahaman (MoU) di bidang kontra terorisme dan memberikan bantuan teknis dalam *Counter Terrorism on Nuclear, Biological and Chemical Weapons (CT-NBC)* melalui *Training for Trainer*.³²

³¹ ASEAN Convention on Counter Terrorism, http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/5383_ASEAN-2007-0257.pdf, diakses pada 23 Mei 2016.

³² Kedutaan Besar Republik Indonesia Kanada, "Perkembangan hubungan bilateral RI-Kanada" <http://www.indonesia-ottawa.org/perkembangan-hubungan-bilateral-ri-kanada/>, diakses pada Mei 2016.

Penutup

Tindakan IS yang menyebarkan ancaman, teror, tindakan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan serangkaian aksi terorisme. Dalam fenomena tersebut pemerintah Indonesia dan masyarakatnya diharuskan untuk bekerjasama dan meningkatkan keamanan lingkungan sekitarnya dalam rangka melawan dan menentang tindakan gerakan kelompok IS. Tindakan memperkuat kerjasama antara pemerintah Indonesia, masyarakat dan aktor-aktor lain dalam hubungan internasional setidaknya dapat mengurangi atau meminimalisir dampak gerakan kelompok IS untuk menciptakan negara Islam.

Seperti yang diketahui di Indonesia, beberapa kali ditemukan kegiatan beberapa yang secara aktif mengkampanyekan IS melalui media massa atau merekrut generasi muda dan masyarakat umum di Indonesia untuk mendukung dan turut bergabung sebagai anggota gerakan IS. Hal ini jelas berpengaruh terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Jadi, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga perlu melakukan tindakan diplomatik dan memperkuat kerjasama antar negara di Asia Tenggara dan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah tentang gerakan kelompok IS.

Kerjasama tersebut menginisiasi terciptanya stabilitas kemandirian regional dan konflik kawasan. Perwakilan dari Indonesia juga memberikan sumbangannya dengan cara mendorong negara-negara-anggota OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) dan parlemen atau PUIIC (*Parliamentary Union of the OIC Member States*) serta Asian Parliamentary Assembly (APA) untuk melindungi kedaulatan negara. Pemerintah juga perlu untuk menganalisis faktor-faktor pendukung IS yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia baik dari segi kehidupan beragama, ekonomi, maupun ideologi. Dengan analisis yang dilakukan pihak-pihak terkait, hal ini dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi pengaruh dan dukungan dari kelompok ekstrimis dan radikal kepada IS.

Situasi dan kondisi ini merupakan tantangan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan terorisme, melindungi masyarakat Indonesia

dari ancaman dan teror yang dapat merusak stabilitas bangsa. Secara umum, dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk agar langkah yang diambil lebih efisien. Tidak hanya BNPT, polisi, Balai Permasalahatan, dan Kementerian Agama yang perlu melakukan intervensi dalam penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh IS. Instansi pemerintah lain dan pihak-pihak terkait permasalahan ini perlu melakukan kerjasama secara mendalam untuk memberikan pemahaman mengenai IS dan aksinya kepada masyarakat Indonesia. Pemahaman kepada masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan kampanye, membentuk forum dan diskusi ataupun memanfaatkan media online maupun cetak untuk memberikan informasi mengenai IS. Pemerintah, pihak terkait dan masyarakat juga perlu bersatu untuk melawan aksi kekerasan yang sering dilakukan oleh kelompok ekstrimis dan radikal.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Azra, Azyumardi. "Fundamentalisme Partai Islam", dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (eds.). *Mengapa partai Islam kalah? Perjalanan politik Islam dari pra-pemilu '99 sampai pemilihan presiden*. Jakarta: Alvabet, 2000.
- Arianti, V. "Indonesia". *Counter Terrorist Trends and Analysis*. vol.7 issue 1 (2015): 4-19.
- Gunaratna, Rohan. "The Rise Of The Islamic State : Terrorism's New Face In Asia", *Panorama 01*, (2015): 9-20.
- Kementerian Agama RI. *Perkembangan paham keagamaan transnasional di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Hendropiyono, A.M. *Terorisme: Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas. 2009.
- ICPVTR. *Unpublished Report*. Singapore: International Centre For Political Violence And Terrorism Reseach. 2015.
- IPAC. "The Evolution Of ISIS in Indonesia". IPAC Report, No. 13 (2014).
- Taufiqurrahman, Muh. "The Road ISIS: How Indonesia Jihadists Travel to Syria and Iraq", *Counter Terrorist Trends and Analysis (CTTA)*. Vol.7 Issue 4 (2015): 17-25.
- USAID. *Indonesian And Malaysian Support For The Islamic State*. South Arlington: Management Systems International Corporate Office. 2015.

Dokumen

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2008 Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Amin, Ma'ruf. "ISIS: Gerakan Kekhalifan Islam Global dan Tantangan bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil Alamin." Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin. 9 August 2014 di Jakarta.
- Azizah, Nur. "Indonesian Political System." Presentasi disampaikan dalam kuliah *Comparative Politics*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 22 Oktober 2010.
- Hasyim, Ahmed S. "The Impact of the Islamic State in Asia." Policy Report. 15 Februari 2015. S. Rajaratnam School of International Studies. 2015.
- Nasar, Fuad. "Gerakan ISIS, Ancaman Ideologi dan Keagamaan NKRI." Sarasehan kementerian Agama. 5 April 2014 di Jakarta.
- USAID. *Indonesian And Malaysian Support For The Islamic State*. South Arlington: Management Systems International Corporate Office. 2006.

Website

- BNPT. 2016. "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme", dalam <http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Strategi-Menghadapi-Paham-Radikalisme-Terorisme.pdf>
- Febrian. 2014. "ISIS Mulai Tanam Pengaruh di Indonesia" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/02/15425531/ISIS.Mulai.Tanam.Pengaruh.di.Indonesia.Pemerintah.Diminta.Batasi.Ruang.Gerak>, diakses pada Maret 2017.
- Halim, Haeril dan Hans Nicholas Jong, 2015. "Government Unblock Radical Websites" dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2015/04/01/govt-unblocks-radical-websites.html>, diakses pada 5 November 2017.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Kanada. "Perkembangan Hubungan Bilateral RI-Kanada" dalam <http://www.indonesia-ottawa.org/perkembangan-hubungan-bilateral-ri-kanada/>, diakses pada Mei 2016.

New York Times. 2014. "Indonesian Militants Join Foreigners Fighting in Syria," dalam <http://www.nytimes.com/2014/02/01/world/asia/indonesian-militants>.

Puspen TNI. 2006. "Keterlibatan TNI dalam Memerangi Terorisme", dalam <http://tni.mil.id/view-3835-keterlibatan-tni-dalam-memerangi-terorisme.html>, diakses pada Desember 2015.